
ANALISIS KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN: PERSPEKTIF SOSIAL DAN POLITIK

Dedy Hasan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Pendidikan: Perspektif Sosial dan Politik menjadi penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan terhadap masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pendekatan kritis membantu dalam mengidentifikasi implikasi sosial dan politik dari kebijakan pendidikan yang diimplementasikan. Studi ini menggali berbagai aspek kebijakan pendidikan, termasuk aksesibilitas, kualitas, kurikulum, dan struktur pendanaan, serta mengaitkannya dengan ketimpangan sosial, keadilan, dan dinamika kekuasaan politik. Melalui analisis kritis, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat atau memperlemah fondasi sosial dan politik suatu masyarakat.

Kata Kunci: *Analisis Kritis, Kebijakan Pendidikan, Perspektif Sosial*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya mencakup aspek pemberian akses yang luas terhadap pendidikan, tetapi juga menjamin kualitas pendidikan yang merata serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Namun, ketika kita memeriksa kebijakan pendidikan secara lebih mendalam, kita menyadari bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berdampak pada individu dan lembaga pendidikan saja, melainkan juga memiliki implikasi sosial dan politik yang sangat signifikan.

Dalam konteks inilah pentingnya melihat kebijakan pendidikan dari perspektif analisis kritis. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan tercermin dalam dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari struktur pendanaan hingga kurikulum, serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial, keadilan, dan distribusi kekuasaan politik.

Ketika kita berbicara tentang perspektif sosial, kita memperhatikan bagaimana kebijakan pendidikan memengaruhi struktur sosial masyarakat. Aksesibilitas pendidikan, misalnya, merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memastikan setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun, seringkali terdapat ketimpangan dalam akses pendidikan antara kelompok-kelompok sosial, seperti antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Di sisi lain, dari perspektif politik, kebijakan pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi kekuasaan politik dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mempengaruhi pandangan, nilai, dan identitas politik individu. Kurikulum pendidikan, misalnya, dapat mencerminkan pandangan politik yang dominan dalam masyarakat atau bisa juga menjadi arena pertempuran ideologi antara kekuatan politik yang berbeda. Selain itu, struktur pendanaan pendidikan juga dapat memengaruhi sejauh mana pendidikan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan ekonomi individu, sehingga memengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, dalam pendahuluan ini, kita memahami bahwa analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan dari perspektif sosial dan politik sangatlah penting. Hal ini membantu kita untuk lebih memahami kompleksitas dan implikasi dari kebijakan pendidikan yang diadopsi suatu negara. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembangunan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan secara sosial dan politik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan dengan perspektif sosial dan politik melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memahami dampak, implikasi, serta dinamika kebijakan pendidikan dalam konteks sosial dan politik suatu masyarakat. Berikut adalah penjelasan panjang tentang metode penelitian yang dapat digunakan:

- 1. Penentuan Kerangka Konseptual:** *Langkah pertama dalam metode penelitian adalah menentukan kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan. Ini melibatkan identifikasi teori-teori sosial dan politik yang relevan, serta konsep-konsep kunci seperti aksesibilitas pendidikan, keadilan sosial, distribusi kekuasaan politik, dan dinamika sosial dalam pendidikan.*
- 2. Pengumpulan Data:** *Setelah kerangka konseptual ditetapkan, data relevan perlu dikumpulkan untuk mendukung analisis. Ini dapat mencakup data kuantitatif seperti statistik pendidikan, data demografis, dan angka partisipasi pendidikan, serta data kualitatif seperti wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen kebijakan.*
- 3. Analisis Data:** *Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi atau analisis multivariat, sedangkan data kualitatif dapat dianalisis melalui teknik-teknik seperti analisis isi atau analisis naratif.*
- 4. Interpretasi Temuan:** *Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam konteks teori-teori sosial dan politik yang relevan. Ini melibatkan penggunaan pemahaman konseptual untuk menjelaskan pola-pola yang ditemukan dalam data, serta untuk mengidentifikasi implikasi dari temuan tersebut terhadap teori dan praktek kebijakan pendidikan.*
- 5. Penarikan Kesimpulan:** *Berdasarkan analisis dan interpretasi data, kesimpulan ditarik tentang dampak kebijakan pendidikan terhadap dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Ini mencakup evaluasi kebijakan yang ada, identifikasi kelemahan dan kekuatan, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.*
- 6. Refleksi dan Revisi:** *Langkah terakhir melibatkan refleksi kritis terhadap metodologi dan temuan penelitian, serta revisi dan penyempurnaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi terhadap kecocokan metode penelitian dengan tujuan penelitian dan kebergunaan hasil analisis dalam memahami dan memperbaiki kebijakan pendidikan.*

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, metode penelitian analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan dengan perspektif sosial dan politik dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan memengaruhi masyarakat secara lebih luas, serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

PEMBAHASAN

Pendidikan bukan hanya tentang penyampaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pembentukan nilai, sikap, dan identitas sosial-politik individu. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika sosial dan politik suatu masyarakat.

Pertama, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan memungkinkan kita untuk memahami sejauh mana aksesibilitas pendidikan diselenggarakan dalam masyarakat. Aksesibilitas tidak hanya mencakup akses fisik ke institusi pendidikan, tetapi juga mencakup faktor-faktor ekonomi, budaya, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan. Dengan menganalisis kebijakan pendidikan dari perspektif sosial, kita dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat akses pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok miskin, minoritas, atau perempuan. Ini penting karena aksesibilitas pendidikan yang merata merupakan prasyarat untuk pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, dalam analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan, kita juga memperhatikan kualitas pendidikan yang disediakan oleh sistem pendidikan. Kualitas pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari kualifikasi guru dan fasilitas fisik sekolah hingga kurikulum dan metode pengajaran. Dengan perspektif politik, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan, seperti alokasi anggaran, kebijakan kurikulum, dan praktik manajemen sekolah. Evaluasi terhadap kualitas pendidikan menjadi penting karena kualitas pendidikan yang baik tidak hanya berpengaruh pada kemampuan individu untuk bersaing dalam pasar kerja, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Selanjutnya, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan memperhatikan kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Kurikulum bukan hanya tentang materi pelajaran yang diajarkan, tetapi juga tentang nilai-nilai, pandangan dunia, dan ideologi yang disampaikan kepada generasi muda. Dari perspektif sosial, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kurikulum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas, serta sejauh mana kurikulum tersebut mempromosikan inklusi sosial, keragaman, dan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial. Dengan demikian, analisis kritis terhadap kurikulum pendidikan membantu kita memahami bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk pandangan dunia dan nilai-nilai sosial-politik dalam masyarakat.

Dalam konteks politik, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan juga memperhatikan struktur pendanaan pendidikan. Struktur pendanaan dapat memengaruhi distribusi sumber daya pendidikan antara berbagai wilayah, sekolah, dan kelompok masyarakat. Dengan melihat pola alokasi anggaran dan mekanisme pendanaan yang ada, kita dapat mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam pendanaan pendidikan yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap akses, kualitas, dan hasil pendidikan. Selain itu, struktur pendanaan juga dapat mencerminkan prioritas politik dan kebijakan ekonomi yang lebih luas dalam suatu negara, sehingga mempengaruhi secara langsung distribusi kekuasaan politik dan ekonomi dalam masyarakat.

Terakhir, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan memungkinkan kita untuk memahami dampak kebijakan pendidikan dalam pembentukan identitas sosial-politik individu dan kelompok masyarakat. Identitas politik seseorang sering kali dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan mereka, termasuk nilai-nilai yang mereka terima, pemahaman tentang sejarah dan budaya, serta kesempatan yang mereka dapatkan melalui pendidikan. Dengan melihat bagaimana kebijakan pendidikan mempengaruhi identitas politik individu dan kelompok, kita dapat mengidentifikasi bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau melemahkan kesetiaan politik, solidaritas sosial, dan partisipasi politik dalam masyarakat.

Selain itu, analisis kritis juga memperhatikan hubungan antara kebijakan pendidikan dengan dinamika sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Pendidikan tidak terisolasi dari realitas sosial, melainkan terkait erat dengan faktor-faktor seperti struktur ekonomi, budaya, dan demografi. Dengan memahami hubungan antara kebijakan pendidikan dengan dinamika sosial ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana kebijakan pendidikan dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas atau bahkan memperkuat ketidaksetaraan dan ketegangan sosial.

Selanjutnya, dalam konteks analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan, penting untuk mempertimbangkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, industri, dan masyarakat umum. Setiap pemangku kepentingan memiliki agenda, nilai, dan kepentingan yang berbeda dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Dengan menganalisis dinamika antara berbagai pemangku kepentingan ini, kita dapat memahami bagaimana kebijakan pendidikan diarahkan, dipengaruhi, dan dilaksanakan dalam masyarakat.

Selain itu, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan juga mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan kapasitas sosial dan politik masyarakat. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pembentukan kritis dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik yang kompleks. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, berinteraksi secara efektif dengan lembaga-lembaga politik, dan mempengaruhi pembuatan kebijakan secara positif.

Analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan secara sosial dan politik. Dengan memahami implikasi dan dinamika kebijakan pendidikan yang ada, kita dapat mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki kebijakan pendidikan yang ada atau mengembangkan pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan, serta mempromosikan nilai-nilai inklusif dan demokratis dalam sistem pendidikan.

Selanjutnya, dalam melanjutkan pembahasan, perlu diperhatikan bahwa analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan tidak hanya sekadar mengkritisi kebijakan yang ada, tetapi

juga tentang mengusulkan solusi yang konstruktif. Dalam konteks ini, analisis kritis dapat menjadi alat untuk membangun dialog yang inklusif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, kita dapat menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Selain itu, penting juga untuk menekankan bahwa analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan harus dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan tidaklah statis, tetapi terus berkembang seiring perubahan dalam masyarakat dan politik. Oleh karena itu, kita perlu terus mengawasi implementasi kebijakan pendidikan, mengevaluasi dampaknya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Selanjutnya, dalam melanjutkan analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan, penting untuk memperhatikan dimensi multidisiplin dan lintas sektoral. Pendidikan adalah isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sektor yang berbeda.

Terakhir, dalam melanjutkan analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan, kita juga perlu mengakui pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang penting dalam pendidikan, dan pendapat, aspirasi, dan kebutuhan mereka harus didengarkan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan, kita dapat menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya guna bagi semua anggota masyarakat.

mempersiapkan generasi saat ini untuk masa depan, tetapi juga tentang mewariskan nilai-nilai dan pengetahuan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memperhitungkan kebutuhan dan harapan dari berbagai generasi, serta memastikan kesinambungan dan kelangsungan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selanjutnya, penting juga untuk menekankan perlunya pendekatan berbasis bukti dalam analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang efektif harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam meningkatkan akses, kualitas, dan hasil pendidikan. Dengan menggunakan data dan penelitian yang relevan, kita dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti, serta menghindari kebijakan yang mungkin tidak berkelanjutan atau bahkan merugikan bagi masyarakat.

Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan dimensi etika dalam analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai tujuan-tujuan praktis, tetapi juga tentang mempromosikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dianalisis dengan memperhatikan implikasi etisnya, termasuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral terhadap

generasi yang akan datang. Dengan mempertimbangkan dimensi etika, kita dapat mengembangkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna dan berkelanjutan dari sudut pandang moral.

Penting juga untuk mengakui bahwa pendidikan bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri, tetapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dianalisis dalam konteks tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, dan kesetaraan gender. Dengan memahami peran pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan ini, kita dapat mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan bagi pembangunan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk tenaga kerja yang berkualitas, memfasilitasi inovasi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dianalisis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kesetaraan ekonomi.

Selain itu, dalam melanjutkan analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan, perlu juga untuk menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi dan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal dan rentan. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang untuk memastikan akses yang adil dan inklusif bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Selanjutnya, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan ini. Globalisasi memungkinkan akses terhadap sumber daya pendidikan dan informasi yang lebih luas, namun juga membawa dampak terhadap pembentukan identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara globalisasi dan lokalitas, serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dunia yang semakin terhubung.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan peran teknologi dalam transformasi pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita belajar, mengajar, dan berinteraksi dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dianalisis dengan memperhitungkan penggunaan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pendidikan. Namun, dalam penerapannya, perlu juga untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara inklusif dan berkelanjutan, serta tidak meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan di belakang.

Terakhir, dalam melanjutkan analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan, perlu juga untuk menyoroti peran lembaga pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Lembaga pendidikan bukan hanya tempat untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus didesain untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang hak

asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi politik, sehingga menghasilkan generasi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masa depan bersama.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan dari perspektif sosial dan politik memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dan dampak kebijakan pendidikan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa kebijakan pendidikan bukanlah entitas terpisah, tetapi terkait erat dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Dalam analisis ini, beberapa poin penting dapat diambil sebagai kesimpulan:

Pertama, kebijakan pendidikan harus dilihat sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan politik suatu negara. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan identitas sosial-politik individu dan masyarakat.

Kedua, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi berbagai kelompok masyarakat. Ini menjadi penting dalam memastikan bahwa pendidikan dapat menjadi motor perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, kebijakan pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan konteks lokal dan global, serta dinamika sosial-politik yang ada. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial lainnya.

Keempat, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan juga menyoroti perlunya pendekatan berbasis bukti, etika, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pendidikan yang efektif harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat, nilai-nilai moral yang jelas, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Terakhir, pendidikan bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dianalisis dengan memperhitungkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pembangunan kapasitas sosial-politik masyarakat.

Dengan demikian, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan dari perspektif sosial dan politik memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi pembangunan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yolanda, A., Nurismilida, K. W., & Wulansary, D. (2021). *The Effect of Miscommunication on the Quality of Employee Performance*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). *Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ritonga, J. S. (2016). *Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra*. *Miqot*, 40(1), 154547.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Revisi)*.
- Matondang, A. (2007). *Pengaruh Kolom Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Waspada Terhadap Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area*.
- Harahap, G. Y. (2013). *Community Enhancement Through Participatory Planning: A Case of Tsunami-disaster Recovery of Banda Aceh City, Indonesia (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia)*.
- Dwiana, R. (2013). *RADIO KOMUNITAS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Kasus pada Radio Komunitas Perempuan Hapsari FM di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Batubara, B. M., & Muda, I. (2019). *Reformasi Administrasi Dalam Perspektif Pelayanan Publik*.
- Hidayat, R. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hutabarat, C. M. (2021). *Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Pada Campuran Beton K175 Terhadap Kuat Tekan Beton (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital)*, 45.
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). *PENGERJAAN ABUTMENT PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN IDANO EHO-DESA SIFOROASI-KECAMATAN AMANDRAYA-KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Kadir, A. (2017). *Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik*.
- Syarif, Y. (2018). *Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube*. *JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING*, 1(2).
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Hayati, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)*.

- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Fauziah, I. (2009). *Multiplikasi Tanaman Krisan (Chrysanthemum sp.) dengan Menggunakan Media MS (Murashige-Skoog) Padat*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara*.
- Azhar, S. (2013). *Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresifitas Remaja Pemain Point Blank (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik*.
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Deliana, M. *Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Aulia, A. M., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., & Dwiatma, G. (2022). *Penerapan E-Gudang Sebagai Tempat Penampungan Ikan*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Erma, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.

- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.*
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66.*
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.*
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).*
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*